

POLITIK IDENTITAS DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2024
DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PROVINSI PAPUA

Alberth Gunawan Wateriri
NPP. 32.1037

Asdaf Kaabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: 32.1037@praja.ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dr. Tri Raharjanto, S.STP., M.Si, M.H

ABSTRACT

Problem Statement: Kabupaten Kepulauan Yapen is recorded as one of the regions with the highest electoral vulnerability in Papua. Identity politics is the main factor increasing the potential for conflict, especially related to differences in religion, ethnicity, and the spread of hoaxes on social media.. **Purpose:** This study aims to examine how identity politics operates in the simultaneous regional head election (Pilkada) 2024 in Kabupaten Kepulauan Yapen and to identify the factors driving identity politics in this election. **Method:** The research employs a qualitative approach with data collection techniques including in-depth interviews, document studies, and direct observation. The main theoretical framework used is Pierre Van Den Berghe's identity politics theory, which includes three approaches: primordialism, constructionism, and instrumentalism. The study involved 38 informants from various groups, including election organizers, customary leaders, religious figures, and voters in strategic areas of Kabupaten Kepulauan Yapen. **Result:** The results show that identity politics plays a central role in the Pilkada 2024 process, particularly in the support for candidates from the Berbai and Toraja ethnic groups who won with 57.94% of the votes. Practices of identity politics were evident in campaign strategies based on ethnicity and religion, as well as in the formation of strategic coalitions between ethnic groups and religious communities. On the other hand, identity politics also created political tensions in several vulnerable districts. **Conclusion:** The study concludes that although identity politics can increase candidate electability, its excessive use threatens social cohesion and weakens substantive democracy. Therefore, it is recommended to strengthen political education, optimize the role of customary institutions and religious leaders, and encourage political parties to focus more on substantive issues rather than exploiting symbolic identity.

Keywords: Regional Elections, Identity Politics, Ethnicity, Papua

ABSTRAK

Permasalahan: Kabupaten Kepulauan Yapen tercatat sebagai salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi di Papua politik identitas menjadi faktor utama yang meningkatkan potensi konflik, terutama terkait perbedaan agama, etnis, dan penyebaran hoaks di media sosial. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana politik identitas dalam proses pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen Apa saja faktor-faktor yang mendorong politik identitas dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi langsung. Teori utama yang digunakan adalah teori politik identitas dari Pierre Van Den Berghe yang mencakup tiga pendekatan: primordialisme, konstruksionisme, dan instrumentalisme. Penelitian ini melibatkan 38 informan dari berbagai kalangan, termasuk penyelenggara pemilu, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat pemilih di wilayah-wilayah strategis di Kabupaten Kepulauan Yapen. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas memainkan peran sentral dalam proses Pilkada 2024, khususnya pada dukungan terhadap pasangan calon dari suku Berbai dan Toraja yang menang dengan perolehan 57,94% suara. Praktik politik identitas terlihat dalam strategi kampanye berbasis etnis dan agama, serta dalam penyusunan koalisi strategis antar kelompok suku dan komunitas keagamaan. Di sisi lain, politik identitas juga menciptakan politik di beberapa distrik rawan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun politik identitas dapat meningkatkan elektabilitas kandidat, namun penggunaannya yang berlebihan dapat mengancam kohesi sosial dan melemahkan demokrasi substansial. Oleh karena itu, disarankan agar pendidikan politik diperkuat, peran lembaga adat dan tokoh agama dioptimalkan, serta partai politik didorong untuk lebih fokus pada isu substantif daripada eksploitasi simbolik identitas.

Kata Kunci: Pilkada Serentak, Politik Identitas, Etnisitas Papua

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 merupakan momentum penting dalam demokrasi lokal di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua. Pilkada menjadi instrumen untuk memilih pemimpin daerah secara langsung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dalam praktiknya, Pilkada tak jarang diwarnai oleh fenomena politik identitas, yaitu strategi politik yang mengedepankan kesamaan etnis, agama, atau asal daerah guna meraih dukungan pemilih. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, politik identitas menjadi fenomena yang menonjol. Keberagaman etnis dan agama, serta masih rendahnya literasi politik masyarakat, dimanfaatkan oleh elit politik untuk meraih suara. Politik berbasis identitas ini dapat mengabaikan isu-isu substantif seperti program pembangunan, bahkan memicu konflik sosial jika tidak dikelola dengan baik. Wilayah Yapen yang heterogen, baik secara etnis maupun geografis, turut memperkuat potensi politik identitas. Distribusi pemilih seperti di Distrik Yapen Selatan dan Yapen Barat menunjukkan keberagaman yang bisa dimobilisasi secara politik. Bahkan distrik-distrik kecil dan komunitas adat pun memiliki peran signifikan dalam pola dukungan politik.

Fenomena politik identitas yang terjadi di Yapen memiliki kemiripan dengan dinamika politik di berbagai negara Afrika yang secara historis dan struktural mengalami tantangan serupa. Dalam konteks Kenya, misalnya, persaingan antara Kenya African National Union (KANU) dan Kenya

African Democratic Union (KADU) pada era dekolonisasi menunjukkan bagaimana regionalisme (Majimboism) dimanfaatkan oleh kelompok minoritas yang merasa terpinggirkan secara politik maupun ekonomi (Anderson, 2005). Wacana ini menggarisbawahi bahwa identitas etnis dan regional sering kali dijadikan instrumen untuk meraih dukungan dalam konfigurasi politik yang tidak sepenuhnya inklusif. Studi lain oleh (CROOK, 1997) mengenai pemilu di Côte d'Ivoire menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang terfragmentasi secara etnis dan agama, strategi oposisi yang memobilisasi sentimen identitas cenderung gagal membentuk koalisi nasional yang efektif. Pemerintah petahana justru memanfaatkan narasi nasionalis untuk mengeliminasi oposisi dan memperkuat kekuasaan. Situasi serupa juga terlihat dalam sistem dua partai di Ghana, yang meskipun tampak stabil secara nasional, justru sangat bergantung pada basis dukungan etnis dan regional yang dinamis dari pemilu ke pemilu (Morrison & Woo Hong, 2006). Penelitian (Nathan, 2016) menyoroti bagaimana ekspektasi atas favoritisme etnis memengaruhi pola pemilihan di kawasan urban Ghana. Di beberapa lingkungan, preferensi terhadap kandidat dari kelompok etnis tertentu tetap kuat, meski masyarakatnya terpapar pada modernisasi dan urbanisasi. Ini menunjukkan bahwa politik identitas tetap bertahan bahkan dalam konteks sosial yang lebih kosmopolitan. Hal serupa juga ditemukan dalam konteks pemilu di Senegal, di mana pemilih pedesaan lebih mudah dipengaruhi oleh patronase dan struktur sosial lokal, yang menjelaskan dukungan besar terhadap petahana meski kebijakan lebih berpihak pada kota (Koter, 2013).

Kondisi di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak jauh berbeda. Menurut Bawaslu Papua, daerah ini termasuk dalam empat wilayah dengan tingkat kerawanan pemilu tertinggi di provinsi tersebut. Politik identitas, penyebaran hoaks, serta potensi pelanggaran kode etik menjadi faktor dominan yang meningkatkan risiko konflik selama Pilkada. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fenomena politik identitas bukan hanya penting secara teoritis, tetapi juga mendesak secara praktis dalam konteks demokrasi lokal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kemenangan pasangan calon dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen dipengaruhi oleh politik identitas berbasis suku atau agama, sebagaimana yang terjadi pada periode Pilkada 2017–2022. Penelitian ini juga ingin menelusuri dinamika politik identitas dengan mempertimbangkan pembelajaran dari berbagai negara yang memiliki kompleksitas etno-politik serupa.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Penelitian mengenai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) telah banyak dilakukan, terutama terkait aspek demokrasi, partisipasi politik, dan dinamika politik identitas. Sebagian besar studi sebelumnya lebih menyoroti dampak politik identitas secara umum terhadap polarisasi masyarakat, kualitas demokrasi, atau stabilitas sosial-politik. Namun, masih terbatas kajian yang secara spesifik menganalisis pengaruh politik identitas terhadap hasil pemilihan di wilayah yang memiliki keragaman etnis dan agama tinggi seperti Kabupaten Kepulauan Yapen. Selain itu, kajian tentang politik identitas di Papua umumnya berfokus pada isu-isu makro seperti konflik horizontal atau representasi politik, tetapi belum banyak yang mengkaji dinamika politik identitas secara elektoral, khususnya dalam konteks Pilkada serentak 2024. Padahal, daerah seperti Yapen yang memiliki kerawanan pemilu tinggi menurut Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Bawaslu, sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut. Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kekosongan tersebut, dengan menelaah secara khusus apakah politik identitas berbasis suku atau agama benar-benar berpengaruh terhadap hasil Pilkada 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, sebagaimana fenomena yang juga terjadi pada Pilkada periode sebelumnya (2017–2022). Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang politik elektoral berbasis identitas dalam konteks lokal Papua yang unik dan kompleks.

1.3. Penelitian Terdahulu

Fenomena politik identitas telah menjadi sorotan penting dalam kajian demokrasi elektoral, terutama di negara-negara dengan masyarakat multikultural seperti Indonesia. Van den Bergh dalam (Sari, 2016) membedakan politik identitas ke dalam tiga pendekatan: **primordialisme** (identitas sebagai sesuatu yang melekat dan tidak berubah), **konstruksionisme** (identitas dibentuk oleh proses sosial dan bisa berubah), dan **instrumentalisme** (identitas digunakan secara strategis untuk kepentingan politik). Ketiganya menjadi bingkai teoritik utama dalam memahami dinamika politik identitas pada Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Penelitian oleh Dhani, (2019) dan Nasrudin & Nurdin, (2019) menunjukkan bagaimana sentimen agama dan etnis digunakan secara eksplisit dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pilgub Sumatera Utara 2018. Kedua studi tersebut menyoroti bahwa lemahnya pendidikan politik dan lemahnya regulasi kampanye memungkinkan isu SARA digunakan secara sistematis. Penggunaan identitas dalam kampanye bukan hanya efektif memobilisasi pemilih, tetapi juga dapat memicu konflik sosial. Demikian pula, penelitian Dauliy et al., (2019) mengkaji Pilgub Sumatera Utara 2018, yang memperlihatkan bagaimana pasangan calon menggunakan strategi etno-religius untuk menarik dukungan, terutama dalam konteks masyarakat majemuk. Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Studi oleh Aspinall et al., (2011) tentang Pilkada Medan tahun 2010 menunjukkan bahwa pada tahap awal, kampanye berjalan dalam semangat koalisi lintas etnis. Namun, pada putaran kedua, muncul mobilisasi berbasis agama secara intensif, khususnya untuk mendukung calon Muslim melawan calon dari etnis Tionghoa yang beragama Buddha. Penelitian ini menyoroti terjadinya *identity switching*, yaitu perubahan strategi kampanye yang disesuaikan dengan konteks politik dan identitas dominan di masyarakat. Sementara itu, studi internasional lain menekankan pentingnya identitas lokal dalam membentuk preferensi pemilih. Collignon & Sajuria, (2018) menemukan bahwa identifikasi regional yang kuat berkorelasi positif dengan preferensi terhadap kandidat lokal. Hal ini didukung oleh studi Klaus, (2020), yang menunjukkan bahwa hubungan tempat tinggal (*place identity*) antara kandidat dan pemilih dapat meningkatkan partisipasi politik dalam pemilu berinformasi rendah. Hasil eksperimen tersebut menunjukkan bahwa keterikatan lokal bukan hanya meningkatkan pilihan terhadap kandidat, tetapi juga memobilisasi pemilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Dalam konteks sistem dua putaran di Norwegia, Panagopoulos et al., (2017) menemukan bahwa ketika kandidat lokal tidak lagi maju pada putaran kedua akibat kesepakatan elite, terjadi penurunan signifikan dalam tingkat partisipasi dan dukungan partai. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan personal antara kandidat dan komunitas lokal dapat menjadi daya dorong kuat dalam meningkatkan efektivitas mobilisasi politik. Selanjutnya, studi di Timur Tengah oleh Fiva & Smith, (2017) di Qatar memperlihatkan bahwa pilihan berbasis identitas tidak semata-mata terkait kepentingan ekonomi atau distribusi sumber daya. Hasil eksperimental mereka menunjukkan bahwa preferensi pemilih lebih dipengaruhi oleh afiliasi etnis dan keagamaan dibanding kompetensi kandidat. Ini memperkuat argumen bahwa identitas sosial bekerja secara psikologis dalam menentukan afiliasi politik, sebagaimana dijelaskan dalam teori identitas sosial (*social identity theory*). Penelitian yang lebih luas oleh Forment, (1989) di Kenya menjelaskan bahwa perebutan kekuasaan lokal kerap dibarengi oleh kekerasan politik yang berlatar belakang etnis dan sengketa tanah. Mobilisasi identitas dalam konteks tersebut bukan hanya bertujuan elektoral, tetapi juga menjadi mekanisme klaim atas akses dan hak-hak ekonomi. Kasus ini menunjukkan bahwa politik identitas sering kali berkelindan dengan konflik struktural yang lebih dalam. Di sisi lain, analisis tentang komunitas imigran oleh Shockley & Gengler, (2020) memperlihatkan bahwa enclave politik seperti komunitas Kuba-Amerika di Miami terbentuk sebagai hasil dari interaksi politik dan sejarah geopolitik. Identitas kelompok dalam enclave tersebut tidak hanya bersifat kultural, tetapi juga politis, yang kemudian menjadi sumber mobilisasi dan perwakilan kolektif.

Dengan menggabungkan perspektif nasional dan internasional, tampak bahwa politik identitas dalam pemilihan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal seperti etnis dan agama, tetapi juga konteks sosial-politik yang lebih luas. Di Indonesia, terutama di wilayah seperti Kabupaten Kepulauan Yapen yang plural dan multikultural, politik identitas berpotensi digunakan secara strategis untuk membentuk loyalitas pemilih. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat merusak kohesi sosial dan integrasi nasional. Studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting untuk memahami bagaimana politik identitas bekerja dalam konteks Pilkada Serentak 2024, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki keragaman etnis dan agama yang tinggi seperti Kabupaten Kepulauan Yapen. Penelitian ini mencoba mengungkap sejauh mana pendekatan primordialisme, konstruksionisme, dan instrumentalisme mewarnai dinamika politik lokal, serta bagaimana strategi kampanye identitas digunakan oleh kandidat dan diterima oleh masyarakat pemilih.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan mengkaji politik identitas dalam konteks Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen, wilayah yang secara geografis dan sosiokultural memiliki karakteristik berbeda dibandingkan dengan wilayah lain yang telah menjadi fokus penelitian sebelumnya. Sebagian besar studi terdahulu menitikberatkan pada dinamika politik identitas di wilayah perkotaan besar seperti DKI Jakarta, Medan, dan Sumatera Utara, atau dalam konteks negara lain seperti Qatar, Kenya, Norwegia, hingga komunitas diaspora di Amerika Serikat. Penelitian-penelitian tersebut cenderung menyoroiti peran agama, etnisitas, serta kedekatan lokal sebagai faktor dominan dalam membentuk preferensi pemilih dan strategi kampanye kandidat. Namun, belum banyak penelitian yang menelusuri bagaimana ketiga dimensi politik identitas yaitu primordialisme, konstruksionisme, dan instrumentalisme—berinteraksi dalam ruang politik lokal di wilayah kepulauan dengan tingkat heterogenitas suku, agama, dan kepentingan lokal seperti di Kabupaten Kepulauan Yapen. Penelitian ini tidak hanya melihat politik identitas dari sisi statis seperti afiliasi agama atau etnis semata, tetapi juga dari sisi bagaimana identitas tersebut dibentuk dan dipolitisasi dalam dinamika kekuasaan lokal serta dimobilisasi secara strategis oleh aktor politik. Kebaruan lain dari penelitian ini terletak pada pendekatan teoritik yang mengintegrasikan kerangka Van den Bergh mengenai politik identitas dengan realitas empiris Pilkada serentak pasca-reformasi di Indonesia bagian timur. Dengan memfokuskan studi pada wilayah yang relatif kurang tereksplorasi secara akademik, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur politik identitas di Indonesia dengan memperluas cakupan geografis, memperdalam pendekatan teoritis, serta memperkaya pemahaman terhadap variasi praktik politik identitas dalam konteks lokal yang berbeda.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk Bagaimana politik identitas dalam proses pemilihan kepala daerah serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen Apa saja faktor-faktor yang mendorong politik identitas dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi sebagai teknik pengumpulan data, yakni dengan menggabungkan beberapa pendekatan seperti wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penggunaan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data, karena temuan dari satu metode dapat dikonfirmasi atau diverifikasi dengan metode lainnya. Dengan demikian, data yang diperoleh menjadi lebih kredibel dan menggambarkan kondisi lapangan secara objektif. (Nurdin & Hartati, 2019). Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari para informan mengenai pandangan, pengalaman, serta persepsi mereka terhadap fenomena yang diteliti. Sementara

itu, observasi digunakan untuk mencermati perilaku, interaksi, dan dinamika sosial yang terjadi di lapangan secara langsung. Studi dokumentasi digunakan sebagai pelengkap untuk menelusuri dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan resmi, data statistik, dan catatan kebijakan yang mendukung analisis penelitian. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui kegiatan lapangan seperti wawancara dan observasi. Jenis data ini bersifat aktual dan menjadi acuan utama dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Di sisi lain, data sekunder berasal dari sumber yang telah tersedia sebelumnya, seperti publikasi ilmiah, dokumen pemerintahan, serta literatur lain yang relevan. Keberadaan data sekunder memberikan konteks tambahan dan mendukung interpretasi terhadap data primer, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap isu yang diteliti (Simangunsong, 2017).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Politik Identitas dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen

Penelitian ini menggunakan pendekatan Van den Bergh tentang politik identitas yang terdiri dari tiga dimensi: primordialisme, konstruksionisme, dan instrumentalisme. Ketiganya dianalisis dalam konteks Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen.

A. Primordialisme

Primordialisme menekankan ikatan etnis, agama, dan budaya yang diwariskan. Dalam Pilkada Yapen 2024, pendekatan ini tercermin dari ketentuan afirmatif dalam UU Otsus Papua yang mensyaratkan calon kepala daerah harus Orang Asli Papua (OAP). Seluruh calon Bupati Yapen 2024 merupakan OAP dengan beragam suku, memperkuat legitimasi identitas primordial secara hukum. Preferensi pemilih juga menunjukkan loyalitas berdasarkan kesamaan suku dan agama. Misalnya, pasangan Arisoy–Palunga didukung kuat oleh komunitas suku Berbai di Distrik Yapen Selatan. Peran gereja dan lembaga adat juga signifikan sebagai aktor politik, seperti pengaruh Gereja Toraja Mamasa. Simbol budaya seperti pakaian adat dan kampanye berbasis tradisi lokal digunakan untuk mengikat emosi pemilih. Dengan demikian, identitas warisan masih menjadi landasan kuat dalam pembentukan loyalitas politik di Yapen.

B. Konstruksionisme

Konstruksionisme melihat identitas sebagai hasil dari proses sosial-politik yang dapat dibentuk. Pasangan Arisoy–Palunga, misalnya, menggabungkan dua latar etnik berbeda (Berbai–Toraja) untuk membangun narasi "pasangan pemersatu." Kampanye mereka memanfaatkan simbol budaya dan bahasa daerah untuk menciptakan kedekatan emosional dengan pemilih. Di wilayah seperti Distrik Serui Kota dan Yapen Timur, ikatan kesukuan tidak dominan, sehingga narasi inklusif lebih diterima. Tokoh agama dan adat berperan sebagai jembatan sosial-politik yang mendukung konstruksi identitas calon. Media sosial juga menjadi alat penting dalam membentuk identitas politik secara digital. Dengan demikian, identitas dalam Pilkada Yapen tidak hanya diwarisi, tetapi dibentuk dan dinegosiasikan untuk menjangkau beragam lapisan masyarakat.

C. Instrumentalisme

Instrumentalisme menempatkan identitas sebagai alat strategis untuk meraih kekuasaan. Strategi pasangan Arisoy–Palunga mencerminkan hal ini melalui dukungan dari tujuh partai dan 15 kursi DPRD, serta aktivasi lembaga adat dan agama dalam kampanye. Identitas juga dimanfaatkan dalam bentuk kampanye budaya seperti ibadah bersama dan pesta rakyat,

sekaligus menjadi sarana legitimasi politik. Media sosial digunakan untuk propaganda identitas, termasuk kampanye negatif berbasis perbedaan identitas. Bahkan dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, identitas dijadikan landasan argumentasi politik, menunjukkan bahwa ia digunakan secara sadar hingga ke proses hukum. Dengan demikian, identitas dalam Pilkada Yapen telah mengalami rasionalisasi sebagai instrumen politik yang efektif dalam setiap tahapan kontestasi.

3.2. Faktor-Faktor yang Mendukung Politik Identitas dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen (Pembahasan Mendalam)

A. Persepsi Ketidakadilan Distribusi Kekuasaan

Persepsi ketidakadilan distribusi kekuasaan merupakan faktor fundamental yang memicu muncul dan menguatnya politik identitas di Kabupaten Kepulauan Yapen. Secara historis, suku Berbai dan Ansus mendominasi posisi-posisi strategis dalam birokrasi dan politik daerah. Data hasil Pilkada 2024 memperlihatkan bahwa pasangan calon yang mewakili suku Berbai dan Ansus (Arisoy–Palunga) berhasil mengamankan 43,01% suara (29.573 suara), jauh mengungguli pasangan lain. Kondisi ini menimbulkan rasa ketidakpuasan di kalangan suku lain, terutama suku Yawa dan komunitas migran yang merasa hak mereka untuk mendapatkan representasi politik setara belum terpenuhi. Ketidakadilan ini tidak hanya berkaitan dengan distribusi kursi politik, tetapi juga terkait akses terhadap sumber daya ekonomi dan pembangunan daerah, yang seringkali dinilai berat sebelah. Dalam konteks demokrasi, persepsi ketidakadilan seperti ini memicu pemilih untuk lebih mengedepankan pilihan yang didasarkan pada identitas etnis sebagai bentuk pembelaan kelompok. Ketidakesetaraan ini diperparah dengan minimnya mekanisme inklusi politik yang efektif, sehingga masyarakat dari suku-suku minoritas cenderung mencari perlindungan melalui dukungan politik yang menegaskan identitas mereka secara eksplisit.

B. Narasi “Putra Daerah” dan Legitimasi Lokal

Narasi “putra daerah” menjadi alat politik yang sangat efektif dalam konteks Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pasangan calon yang berhasil menggunakan narasi ini mampu membangun legitimasi lokal yang kuat di mata masyarakat. Arisoy, misalnya, dengan latar belakang dari Kampung Waropen, dan Palunga dari Kampung Amungme, secara simbolis diidentifikasi sebagai representasi “anak asli daerah”. Narasi ini bukan sekadar slogan, tetapi dipenuhi makna kultural yang mendalam, dimana “putra daerah” diartikan sebagai figur yang memahami nilai-nilai, adat istiadat, dan aspirasi komunitas secara langsung. Hal ini memberikan keuntungan elektoral karena masyarakat cenderung mempercayai figur yang dianggap sebagai bagian dari komunitas mereka sendiri. Secara psikologis, narasi ini menguatkan rasa kebanggaan dan solidaritas kultural, sekaligus membentuk batas sosial antara “kami” (putra daerah) dan “mereka” (pendatang atau kelompok luar). Oleh karena itu, narasi ini secara efektif menjadi faktor pemersatu sekaligus pemisah dalam kontestasi politik.

C. Kompleksitas Demografi dan Strategi Koalisi Lintas Etnis

Demografi Kabupaten Kepulauan Yapen yang sangat heterogen mendorong partai politik dan pasangan calon untuk melakukan strategi koalisi lintas etnis sebagai upaya memperluas basis dukungan. Dengan adanya beberapa suku utama—Berbai, Ansus, Yawa, Toraja, dan Buton—koalisi lintas etnis menjadi keharusan pragmatis bagi kemenangan politik. Misalnya, pasangan Arisoy–Palunga yang didukung oleh 7 partai politik (menguasai 15 kursi di DPRD) berhasil menyatukan berbagai kelompok suku dan kepentingan dalam satu koalisi. Strategi ini menunjukkan bahwa politik identitas tidak semata-mata menjadi sumber konflik, tetapi juga dapat menjadi medium negosiasi dan kompromi antar kelompok. Namun, di balik koalisi

tersebut, terdapat dinamika kompleks yang menuntut kompromi atas tuntutan-tuntutan identitas dan janji politik. Koalisi ini tidak selalu harmonis dan terkadang mengandung potensi konflik internal akibat persaingan kepentingan etnis yang berlainan.

D. Faktor Geografis dan Segmentasi Komunitas

Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki kontur geografis yang unik, terdiri dari pulau-pulau dan daerah pesisir serta pegunungan. Faktor geografis ini mempengaruhi pola migrasi, interaksi sosial, dan segmentasi komunitas secara alami. Data pemilih menunjukkan adanya kecenderungan bahwa masyarakat di wilayah pesisir lebih memilih calon yang berasal dari komunitas pesisir, sedangkan masyarakat pegunungan cenderung mendukung calon yang dikenal dan memiliki afiliasi budaya dari daerah mereka sendiri. Segmentasi ini memperkuat politik identitas sebagai refleksi dari perbedaan sosial dan ekonomi yang juga terkait dengan kondisi geografis. Ketimpangan akses layanan publik dan infrastruktur antara daerah pesisir dan pegunungan kerap memperkuat kesadaran identitas kultural yang berbeda, sehingga politik identitas menjadi cara bagi komunitas tersebut untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka secara lebih efektif.

E. Peran Partai Politik dan Koalisi Berbasis Identitas

Dalam konteks Pilkada Kabupaten Kepulauan Yapen, partai politik lebih mengedepankan pertimbangan elektoral yang berbasis identitas daripada ideologi politik yang jelas. Hal ini terlihat dari koalisi besar yang mendukung pasangan Arisoy–Palunga dibandingkan dengan pasangan lain yang hanya didukung satu partai saja. Keberadaan koalisi besar ini mencerminkan bahwa partai politik melihat identitas suku dan basis sosial sebagai modal utama untuk meraih suara pemilih. Strategi ini sering kali mengabaikan konten program pembangunan yang substansial dan cenderung menggunakan identitas sebagai alat politik praktis. Fenomena ini juga mencerminkan kelemahan sistem partai politik dalam membangun agenda politik yang inklusif dan berbasis kepentingan kolektif masyarakat secara luas, yang akhirnya memicu fragmentasi sosial dan polarisasi politik yang berlebihan.

F. Eksploitasi Identitas dan Kelemahan Pengawasan Pemilu

Data dari laporan pengawas pemilu dan hasil pengamatan menunjukkan bahwa kampanye berbasis politik identitas, terutama di media sosial dan ruang komunikasi informal, dilakukan secara masif dan kadang menggunakan narasi yang provokatif. Rendahnya tingkat literasi politik dan pendidikan di beberapa wilayah pedesaan Kabupaten Kepulauan Yapen membuat pemilih rentan terhadap penyebaran informasi yang bersifat manipulatif dan emosional. Misalnya, pesan-pesan yang menyentuh isu-isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan) sering kali disebar untuk memecah belah pemilih berdasarkan sentimen kultural dan keagamaan. Kelemahan pengawasan oleh lembaga terkait menambah risiko praktik politik identitas yang berlebihan sehingga mengancam proses demokrasi yang sehat dan berkeadilan. Hal ini juga berdampak pada meningkatnya potensi konflik sosial pasca-pemilihan yang harus dikelola dengan bijak oleh semua pihak.

G. Wacana Dominasi Suku dan Ketimpangan Representasi

Wacana dominasi suku Berbai dan Ansus dalam struktur pemerintahan dan politik menjadi sumber ketegangan utama di Kabupaten Kepulauan Yapen. Banyak anggota suku lain yang merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses yang sama terhadap kekuasaan dan sumber daya. Ketimpangan ini memunculkan aspirasi untuk mengubah pola representasi melalui jalur politik, yang mendorong masyarakat minoritas untuk memperkuat identitasnya sebagai modal perjuangan. Ketidakpuasan ini tercermin dalam suara pemilih dan munculnya gugatan sengketa Pilkada oleh pasangan calon nomor 4, yang menunjukkan bahwa konflik politik identitas bukan hanya retorika tetapi juga berimplikasi pada proses hukum dan

demokrasi. Dalam jangka panjang, jika tidak diatasi, ketimpangan ini berpotensi menggerus kohesi sosial dan stabilitas politik daerah.

H. Peran Paguyuban dan Struktur Sosial Lokal

Paguyuban, organisasi sosial kedaerahan dan komunitas marga memainkan peran penting dalam memobilisasi dukungan politik di tingkat akar rumput. Struktur sosial ini sangat efektif karena didasarkan pada ikatan kekerabatan dan solidaritas yang kuat. Di Kabupaten Kepulauan Yapen, paguyuban suku Toraja dan komunitas marga lainnya menjadi basis utama penggerak suara untuk calon yang mereka dukung. Mobilisasi ini sering kali dilakukan melalui pendekatan tradisional seperti musyawarah adat, pertemuan keluarga, dan acara sosial keagamaan. Pengaruh paguyuban memperlihatkan bahwa politik identitas tidak hanya berwujud simbolis tetapi juga operasional dalam praktik politik sehari-hari. Hal ini juga menegaskan bahwa struktur sosial lokal masih sangat kuat dan menjadi basis legitimasi politik bagi para calon.

I. Peran Tokoh Adat dan Tokoh Marga

Tokoh adat dan tokoh marga memiliki posisi sentral dalam struktur sosial Kabupaten Kepulauan Yapen. Mereka tidak hanya menjadi simbol kultural, tetapi juga memiliki otoritas dalam mengarahkan pilihan politik masyarakat. Keberadaan tokoh adat sebagai penjaga nilai-nilai tradisional dan mediator sosial menjadikan mereka agen penting dalam menenangkan potensi konflik politik identitas. Dalam Pilkada 2024, tokoh adat dan tokoh marga berperan sebagai fasilitator komunikasi politik yang menjaga keharmonisan sosial, sekaligus menggerakkan dukungan politik bagi calon yang dianggap mewakili kepentingan komunitas mereka. Peran ini sangat krusial mengingat kondisi geografis dan sosial yang terfragmentasi, dimana tokoh adat menjadi jembatan antara komunitas dan institusi politik formal.

J. Sengketa Hasil Pilkada dan Implikasi Politik Identitas

Gugatan sengketa Pilkada yang diajukan oleh pasangan nomor 4 (Yehundar–Ayomi) ke Mahkamah Konstitusi mencerminkan betapa politik identitas juga bisa menjadi sumber konflik politik yang serius. Gugatan tersebut berakar pada ketidakpuasan hasil pemilu yang dinilai kurang merefleksikan aspirasi suku dan kelompok tertentu. Penolakan gugatan oleh Mahkamah Konstitusi dengan pengesahan kemenangan Arisoy–Palunga menandai penyelesaian formal konflik, namun meninggalkan tantangan tersendiri dalam menjaga integrasi sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Fenomena sengketa ini menggambarkan bahwa politik identitas, jika tidak dikelola dengan baik, dapat memperuncing polarisasi dan mengancam stabilitas politik daerah. Oleh karena itu, perlunya mekanisme dialog, rekonsiliasi, dan pendidikan politik yang inklusif menjadi sangat mendesak untuk meredam dampak negatif politik identitas.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penelitian ini mengungkap bahwa politik identitas memainkan peran dominan dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Kepulauan Yapen. Temuan ini selaras dengan berbagai studi terdahulu yang menegaskan bahwa identitas etnis dan agama sering digunakan sebagai alat mobilisasi politik dalam masyarakat yang multikultural. Namun, penelitian ini menawarkan nuansa baru dengan menyoroti bagaimana isu ketimpangan distribusi kekuasaan antarsuku lokal, seperti dominasi suku Berbai dan Ansus, menjadi pemicu utama munculnya sentimen identitas. Temuan ini memperluas pemahaman bahwa politik identitas tidak hanya didorong oleh konstruksi sosial atau strategi elit politik, melainkan juga oleh dinamika ketimpangan struktural antar kelompok etnis dalam satu wilayah. Berbeda dari kasus-kasus seperti Pilkada DKI Jakarta atau Pilgub Sumatera Utara, yang lebih menekankan isu agama atau perbedaan mayoritas-minoritas secara nasional, konteks Yapen

menunjukkan bahwa politik identitas dapat tumbuh dari ketegangan internal lokal yang bersifat primordial. Dalam konteks ini, strategi “putra daerah” menjadi instrumen yang sangat kuat untuk memperoleh legitimasi politik, sebuah fenomena yang menguatkan pendekatan instrumentalisme sekaligus memperlihatkan penggunaan identitas lokal sebagai kapital politik. Sementara studi sebelumnya di Medan dan Qatar menunjukkan bahwa terjadi perubahan strategi kampanye berbasis identitas seiring dengan perubahan dinamika elektoral, penelitian ini menemukan bahwa di Kepulauan Yapen politik identitas sudah hadir secara struktural sejak awal proses kontestasi. Dengan kata lain, identitas bukan hanya digunakan secara adaptif, tetapi menjadi kerangka dasar dalam proses pencalonan, penyusunan koalisi, hingga mobilisasi suara. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor geografis memiliki dampak signifikan dalam memperkuat segmentasi identitas politik. Pemilih cenderung berafiliasi kepada calon yang berasal dari komunitas atau wilayah yang sama, menunjukkan bagaimana place identity menjadi determinan dalam perilaku elektoral di wilayah kepulauan. Hal ini memperkaya temuan dari penelitian internasional yang menggarisbawahi pentingnya hubungan tempat tinggal dengan kandidat dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Temuan lain yang penting adalah peran sentral aktor-aktor tradisional seperti tokoh adat dan paguyuban lokal dalam memperkuat politik identitas. Elemen ini belum banyak diangkat dalam literatur terdahulu, yang umumnya menyoroti peran partai atau elite politik nasional. Dalam konteks Yapen, tokoh-tokoh lokal tidak hanya menjadi simbol identitas, tetapi juga aktor utama dalam proses mobilisasi dan mediasi politik. Ini memberikan wawasan baru bahwa politik identitas di tingkat lokal tidak hanya ditentukan oleh struktur partai atau institusi formal, melainkan juga oleh institusi informal yang memiliki legitimasi sosial kuat. Meskipun politik identitas terbukti efektif dalam memperoleh dukungan elektoral, penelitian ini juga menyoroti sisi gelapnya. Praktik politik identitas yang terlalu tajam justru membuka peluang terjadinya konflik dan polarisasi horizontal. Hal ini tercermin dari munculnya sengketa hasil pilkada yang dilayangkan oleh salah satu pasangan calon, menunjukkan bahwa politik identitas yang tidak dikelola dengan baik dapat menciptakan ketegangan sosial yang mengganggu stabilitas demokrasi lokal.

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik lainnya adalah bahwa politik identitas di Kabupaten Kepulauan Yapen tidak selalu berdampak negatif. Politik identitas juga berfungsi sebagai media untuk negosiasi dan kompromi antar suku dalam koalisi politik, serta menjadi basis solidaritas sosial dan budaya yang memperkuat ikatan komunitas. Peran paguyuban dan tokoh adat sebagai mediator sosial dan penggerak dukungan politik menegaskan bahwa struktur sosial tradisional masih sangat berpengaruh dalam politik kontemporer daerah ini. Namun, penggunaan politik identitas yang berlebihan dan manipulatif melalui media sosial berpotensi mengganggu proses demokrasi yang sehat dan menciptakan polarisasi sosial. Selain itu, adanya ketimpangan representasi suku minoritas membuka ruang kritik terhadap sistem demokrasi lokal yang kurang inklusif dan menuntut adanya reformasi politik untuk pemerataan akses kekuasaan.

IV. KESIMPULAN

Politik identitas di Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor historis, demografis, sosial budaya, dan politik praktis. Persepsi ketidakadilan distribusi kekuasaan antar suku, narasi putra daerah, dan faktor geografis menjadi pendorong utama munculnya politik identitas. Peran partai politik, paguyuban, dan tokoh adat memperkuat dinamika ini baik dalam penguatan solidaritas maupun potensi konflik. Meskipun politik identitas dapat menjadi alat konsolidasi sosial, bila tidak dikelola secara bijak akan memicu polarisasi dan konflik politik. Oleh

karena itu, penguatan mekanisme demokrasi yang inklusif dan peningkatan pendidikan politik masyarakat sangat diperlukan untuk meredam dampak negatif politik identitas di daerah.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan data primer yang terbatas pada wawancara dan observasi di beberapa wilayah strategis, sehingga kemungkinan ada dinamika politik identitas di daerah lain yang kurang terwakili. Selain itu, penelitian ini kurang mengkaji secara mendalam peran media sosial dan teknologi informasi dalam penyebaran politik identitas yang kini semakin masif dan kompleks. Keterbatasan lain adalah kurangnya analisis longitudinal yang mengamati perubahan politik identitas dari pilkada sebelumnya hingga pilkada 2024, sehingga belum mampu menggambarkan tren perkembangan secara utuh.

Arah Penelitian Masa Depan (*Future Work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan melibatkan data primer yang lebih komprehensif, termasuk survei kuantitatif untuk mengukur tingkat persepsi politik identitas secara lebih representatif. Penelitian mendatang juga perlu fokus pada analisis peran media sosial dan digitalisasi komunikasi politik dalam pembentukan dan penyebaran politik identitas, serta dampaknya terhadap kohesi sosial dan stabilitas politik. Selain itu, studi longitudinal tentang perkembangan politik identitas di Kabupaten Kepulauan Yapen maupun wilayah lain dengan karakteristik serupa akan sangat berguna untuk memahami dinamika jangka panjang dan strategi mitigasi konflik. Pendekatan interdisipliner yang menggabungkan sosiologi politik, antropologi budaya, dan komunikasi politik juga disarankan untuk memperkaya pemahaman fenomena politik identitas secara holistik.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, D. M. (2005). 'Yours in Struggle for Majimbo'. Nationalism and the Party Politics of Decolonization in Kenya, 1955-64. *Journal of Contemporary History*, 40(3), 547-564. <https://doi.org/10.1177/0022009405054571>
- Aspinall, E., Dettman, S., & Warburton, E. (2011). When Religion Trumps Ethnicity: A Regional Election Case Study from Indonesia. *South East Asia Research*, 19(1), 27-58. <https://doi.org/10.5367/sear.2011.0034>
- Collignon, S., & Sajuria, J. (2018). Local means local, does it? Regional identification and preferences for local candidates. *Electoral Studies*, 56, 170-178. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2018.07.003>
- CROOK, R. C. (1997). Winning Coalitions And Ethno-Regional Politics: The Failure Of The Opposition In The 1990 And 1995 Elections In Cote D'ivoire. *African Affairs*, 96(383), 215-242. <https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.afraf.a007826>
- Dauliy, S. M., Kusmanto, H., & Kadir, A. (2019). Politik Identitas Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara tahun 2018. *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.31289/jap.v9i1.2230>
- Dhani, F. W. (2019). Komunikasi Politik Berbasis Politik Identitas Dalam Kampanye Pilkada. *Journal*

Of Communication Studies, 4(1).

- Fiva, J. H., & Smith, D. M. (2017). Local candidates and voter mobilization: Evidence from historical two-round elections in Norway. *Electoral Studies*, 45, 130–140. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.11.021>
- Forment, C. A. (1989). Political practice and the rise of an ethnic enclave. *Theory and Society*, 18(1), 47–81. <https://doi.org/10.1007/BF00160688>
- Klaus, K. (2020). *Political Violence in Kenya*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108764063>
- Koter, D. (2013). Urban and rural voting patterns in Senegal: the spatial aspects of incumbency, c. 1978–2012. *The Journal of Modern African Studies*, 51(4), 653–679. <https://doi.org/10.1017/S0022278X13000621>
- Morrison, M. K. C., & Woo Hong, J. (2006). Ghana's political parties: how ethno/regional variations sustain the national two-party system. *The Journal of Modern African Studies*, 44(4), 623–647. <https://doi.org/10.1017/S0022278X06002114>
- Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 1(1), 34–47. <https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260>
- Nathan, N. L. (2016). Local Ethnic Geography, Expectations of Favoritism, and Voting in Urban Ghana. *Comparative Political Studies*, 49(14), 1896–1929. <https://doi.org/10.1177/0010414016655540>
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Panagopoulos, C., Leighley, J. E., & Hamel, B. T. (2017). Are Voters Mobilized by a 'Friend-and-Neighbor' on the Ballot? Evidence from a Field Experiment. *Political Behavior*, 39(4), 865–882. <https://doi.org/10.1007/s11109-016-9383-3>
- Sari, E. (2016). *Kebangkitan Politik Identitas Islam Pada Arena Pemilihan Gubernur Jakarta*. 2(2), 145–156.
- Shockley, B., & Gengler, J. J. (2020). Social identity and coethnic voting in the Middle East: Experimental evidence from Qatar. *Electoral Studies*, 67, 102213. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2020.102213>
- Simangunsong, F. (2017). *Metodologi Pemerintahan: Teoritik, Legalistik, Empirik, Inovatif* (Edisi Kedu). CV. ALfabeta.